

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
*QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Skripsi**

**DESTIANINGSI**  
**NPM: 1721030157**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
*QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Skripsi**

**Dajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**DESTIANINGSI  
NPM. 1721030157**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing 1 : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

## ABSTRAK

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran yang bersifat nontunai. Bank Indonesia meluncurkan standar *Quick Response* (QR Code) yang tertuang pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. QR Code ini merupakan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS). Ketika aplikasi pembayaran digital yang digunakan oleh konsumen berbeda-beda, namun pihak toko (*merchant*) cukup menyediakan 1 kode QR saja. QRIS sama halnya dengan uang elektronik menawarkan banyak kenyamanan dan kemudahan. Namun di samping mempunyai banyak manfaat dan keunggulan, menimbulkan *pro* dan *kontra* di kalangan masyarakat. Beberapa pihak meragukan keamanan serta keefektifan sistem pembayaran ini dan sistem ini masih memerlukan adanya sosialisasi terkait prosedur penggunaannya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik? *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik dan memberikan pemahaman yang lebih pada masyarakat mengenai penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik menurut analisis hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu penelitian yang data-data nya berupa kata-kata yang berasal dari sumber buku, jurnal, catatan dan dokumen atau penelitian yang mengutamakan pendeskripsian secara analisis. Prosedur pengumpulan data penelitian kepustakaan ini yaitu peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dokumen lainnya, kemudian setelah data terkumpul dilakukan keabsahan data dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua jenis mekanisme dalam transaksi QRIS yaitu: *Push payment* dan *Pull payment*, sedangkan metode QRIS ini terdiri dari 2 media yakni: Statis dan Dinamis. Jual beli menggunakan QRIS pada *Merchant* sama seperti perjanjian akad jual beli pada umumnya, yaitu akad antara dua belah pihak di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Namun, penerapan MDR yang hanya ditetapkan oleh satu pihak, yaitu Bank Indonesia tanpa kesepakatan atau unsur kerelaan oleh *merchant* sehingga terjadi Pemaksaan (*Al-Ikrah*) maka penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik tidak memenuhi syarat sah dan menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Di karenakan penggunaan QRIS dapat dilakukan apabila uang elektronik tersedia pada sebuah aplikasi. Maka penggunaan uang elektronik telah diatur sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam perspektif hukum syariah uang elektronik atau *e-money* diperbolehkan berlandaskan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destianingsi  
NPM : 1721030157  
Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE* *INDONESIAN STANDARD* DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2021  
Penulis:

**Destianingsi**  
**NPM. 17210310157**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Destianingsi**

**Npm : 1721030157**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**NIP. 196010211991031003**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**NIP. 197409202003121003**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENGUNAAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK” disusun oleh DESTIANINGSI, NPM :  
1721030157, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah  
diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan  
Lampung pada hari/tanggal: Senin, 28 Juni 2021**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

(.....)

**Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.**

(.....)

**Penguji Utama : Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I.**

(.....)

**Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

(.....)

**Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

(.....)

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. KH. Khairuddin, M.H.**

**NIP. 196210221993031002**

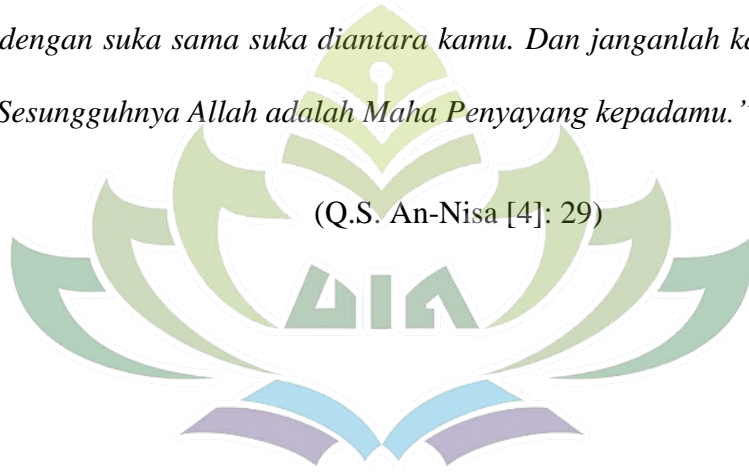


## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء :  
(96

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh  
dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(Q.S. An-Nisa [4]: 29)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan kasih dan rahmat-Nya untuk memudahkan segala urusan dalam penyusunan skripsi ini, dengan ucapan syukur skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Askani dan Ibu Yulianti atas segala pengorbanan yang selalu memberikan dukungan serta senantiasa mendoakanku demi kelancaran dan kemudahan dalam menjalani hidup sehingga bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Berkat didikan dan kasih sayang dari Bapak dan Ibu, aku bisa sekuat ini dalam menjalani hari untuk menyelesaikan skripsi sebagai jenjang untuk meraih mimpi.
2. Adikku tersayang Resi Lianda yang selalu menghibur dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.



## RIWAYAT HIDUP

Destianingsi, dilahirkan di Lubuklinggau Sumatra Selatan pada tanggal 13 Februari, anak pertama dari pasangan Bapak Askani dan Ibu Yulianti. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 11 Lubuklinggau dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Lubuklinggau dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas dan selesai pada tahun 2016 dan mengikuti mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017/2018 sampai dengan selesai.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra, yaitu DEMA Fakultas Syariah, UKM Bapinda, UKMF Gemais, LDC, PKPT IPNU/IPPNU, KSPM, IKAMM OKI, GenBI, Mata Pena, Komunitas Teman Halal Lampung, Relawan Nusantara Lampung, *Volunteer* Forum Indonesia Muda Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2021

Yang membuat,

**Destianingsi**  
**NPM. 1721030157**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* dalam Transaksi Elektronik**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjalankan ajaran Islam dan sunahnya hingga akhir zaman untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi.



4. Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Muamalah, Bapak Muslim M.H.I dan Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag selaku staf tenaga ahli yang telah memberikan arahan kepada mahasiswanya.
5. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa kuliah.
7. Kepala beserta seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Guru-guruku tercinta dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, yang telah mengajarkan banyak hal dan memberikan berbagai ilmu sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
9. Seluruh pengurus dan teman-teman organisasi intra maupun ekstra kampus yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.
10. Keluarga tanpa KK Ketum Rustam, Kak Ilham, Kak Zainal, Kak Andri, Sajjad, Syafrie, Bunda Uci, Mbak Ana, Mak Salis, Devi, Luthfiyah, Dian, Sepda, Pajar, yang telah memberikan banyak bahagia selama masa perkuliahan.

11. Sahabat seperjuangan Nia, Indah, Putri, Enneke, Rani, Ika, Asih, Jaya, Zaelani, Bobby, Jejen, yang telah bersedia memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
12. Para teman-temanku Muamalah kelas D 2017 yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
13. Diri sendiri yang telah kuat dan selalu berjuang untuk tidak pantang menyerah menggapai impian dan cita-cita.
14. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga segala kebaikan yang berikan oleh berbagai pihak dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah swt, dan demi kemajuan penelitian diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini. Penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih ada kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki.

Akhirnya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca pada umumnya dan untuk penelitian selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Bandar Lampung, Mei 2021

Penulis,

**Destianingsi**  
**NPM. 1721030157**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
 <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Hukum Islam Tentang Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli dalam Islam .....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
3. Etika dan Prinsip Jual Beli .....	26
4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	28
5. Macam-Macam Jual Beli .....	45
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	46
B. Uang Elektronik Syariah dalam Fatwa DSN-MUI .....	48
C. Transaksi Elektronik .....	56
1. Pembayaran Elektronik .....	56
2. Jenis- jenis Transaksi Elektronik .....	57
3. Mekanisme Transaksi Elektronik.....	58
 <b>BAB III QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS)</b>	
A. Pengertian <i>Quick Response Indonesian Standard</i> .....	60
B. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Transaksi Elektronik.....	64
C. Ruang Lingkup Penggunaan QR Code Pembayaran .....	67

D. Aplikasi di Indonesia yang Terhubung <i>Quick Response Indonesian Standard</i> .....	71
E. Batas Transaksi <i>Quick Response Indonesian Standard</i> .....	76
F. Pemrosesan Transaksi <i>Quick Response Indonesian Standard</i> .....	77
G. Manfaat <i>Quick Response Indonesian Standard</i> .....	80
H. Kelebihan dan Kelemahan <i>Quick Response Indonesian Standard</i> .....	81
 <b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Penggunaan QRIS dalam Transaksi Elektronik.....	86
B. Hukum Islam Terhadap Penggunaan QRIS dalam Transaksi Elektronik.....	90
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Rekomendasi .....	96
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : QR <i>Code</i> untuk transaksi pembayaran .....	61
Gambar 2 : Implementasi QRIS untuk pembayaran .....	63
Gambar 3 : Jenis QR pada <i>Merchant</i> .....	68
Gambar 4 : Jenis mekanisme dalam transaksi QRIS .....	69



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : PADG No.21/18 /PADG/2019
- Lampiran 2 : Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017
- Lampiran 3 : Blanko Konsultasi
- Lampiran 4 : Hasil Turnitin



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Untuk memperjelas persepsi permasalahan yang ada pada pokok pembahasan, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* dalam Transaksi Elektronik”**.

Hukum Islam dalam pengertian ini adalah hukum ekonomi syariah yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam masalah harta.<sup>1</sup> Dari definisi ini, pembahasan fikih muamalah itu menyangkut akad tukar menukar (*mu'awadhah*), seperti jual beli, sewa-menyewa. Akad tolong menolong (*tabarru'j*), seperti hibah, wakaf, wasiat. Akad bagi hasil (*syirkah*), seperti akad kerjasama (*kafalah*), akad pengalihan (*hiwalah*).<sup>2</sup>

QRIS (*Quick Respon Code Indonesian Standard*) adalah standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.<sup>3</sup>

Transaksi Elektronik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk menciptakan perubahan terhadap harta atau keuangan yang

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016), 3.

<sup>2</sup> Ibid., 4.

<sup>3</sup> Pasal 1 PADG.No.21/18/PADG/2019.



dimiliki baik itu agar bertambah maupun berkurang, berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini adalah sebuah penelitian yang menganalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah mengenai Penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* dalam Transaksi Elektronik.

## B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam).<sup>5</sup> Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi : “*al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang inilah yang menurut para ahli *ushul fiqh* disebut persoalan-persoalan *ta’aquliyyat* (yang bisa dinalar) atau *ma’kulatul ma’na* (yang bisa dimasukkan logika).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 466.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 5.

<sup>6</sup> Ibid., 6.

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.<sup>7</sup> Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan aturan hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta.<sup>8</sup> Sehingga dalam berinteraksi dalam memenuhi berbagai kebutuhan, Islam telah mengatur perkara yang berhubungan dengan pertukaran harta. Sesuai dengan firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( النساء  
: 96)

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(Q.S An Nisa' [4] : 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah befirman janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil (*ilegal*). Kecuali harta itu menjadi

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), viii.

<sup>8</sup> Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), 7.

barang dagangan; berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan.

Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli sebagai bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>9</sup>

Ketika belum terjadi transaksi jual beli, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Akan tetapi ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antarsesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia

---

<sup>9</sup> Ibid.



yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter.<sup>10</sup>

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi yang saling menguntungkan. Misalnya, pada satu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan gula. Namun saat yang bersamaan pemilik gula sedang tidak membutuhkan beras melainkan ikan, sehingga syarat terjadinya barter dengan gula tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit muamalah antar manusia. Maka, diperlukan alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.<sup>11</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat berdampak terhadap kegiatan perekonomian khususnya pada bidang keuangan dan juga perbankan. Munculnya inovasi keuangan yaitu perubahan sistem pembayaran adalah penyesuaian terhadap kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Perkembangan sistem pembayaran mendorong meningkatnya besaran nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Pembayaran menjadi suatu komponen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Namun semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini serta

---

<sup>10</sup> Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, VII ed, (Bandung: Tarsito, 1995), 255.

<sup>11</sup> M.Manullang, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 11.

makin besarnya nilai transaksi dan risiko mendorong masyarakat untuk menginginkan adanya sistem pembayaran yang aman dan lancar. Sistem pembayaran yang aman dan lancar selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman, cepat, juga sangat diperlukan dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya. Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran yang bersifat nontunai.<sup>12</sup>

Bank Indonesia selaku otoritas moneter memiliki hak dan wewenang dalam perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu mengatur dan menjaga mekanisme sistem keuangan agar tetap stabil baik tunai maupun non tunai. Pada sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia bertanggungjawab atas pengeluaran dan peredaran uang tunai kepada masyarakat. Namun, seiring waktu penggunaan nilai transaksi pembayaran tunai menimbulkan banyak permasalahan dan kelemahan. Sehingga dibutuhkan inovasi sistem pembayaran yang mampu menjawab permasalahan dan membenahi kelemahan dari sistem pembayaran tunai. Oleh karena itu, pembayaran non tunai tercipta sebagai wujud inovasi lebih lanjut pada sistem keuangan yang lebih efisien.<sup>13</sup>

Bank Indonesia meluncurkan standar *Quick Response* (QR Code) yang tertuang pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang

---

<sup>12</sup> Nindi Anindya Putri, “Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 1.

<sup>13</sup> Ibid., 2.

Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. *QR Code* ini merupakan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut *QR Code Indonesian Standard (QRIS)* yang telah resmi diaktifkan sejak 1 Januari 2020. Peresmian penggunaan QRIS sebagai QR media pembayaran penggunaan uang elektronik ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap revolusi sistem pembayaran Indonesia di era digital seperti sekarang. Peluncuran QRIS digadang-gadang menjadi sarana pembayaran wajib berbasis QR dari seluruh aplikasi pembayaran QR di Indonesia.

QRIS merupakan standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Peluncuran QRIS juga merupakan perwujudan dari visi Sistem Pembayaran Indonesia pada 2025. QRIS ini memiliki slogan UNGGUL yang merupakan akronim dari Universal, Gampang, Untung, dan Langsung, yang memiliki tujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusif keuangan, memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia Maju. Semangat ini sejalan dengan tema HUT RI Ke 74, yakni Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju.<sup>14</sup>

Penerapan QRIS merupakan sebuah terobosan baru dalam sistem pembayaran. Peluncurannya yang dapat dikatakan masih segar ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dikutip dari laman resmi

---

<sup>14</sup> Onny Widjanarko, "QRIS Satu *QR Code* Untuk Semua Pembayaran", *Bank Indonesia*, 2019, [http://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP\\_21219.aspxm](http://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_21219.aspxm).



warta ekonomi, menyatakan bahwa peluncuran sistem pembayaran melalui QRIS mendapat sambutan baik dari *merchant* maupun pengguna (konsumen), namun sebaliknya terdapat beberapa pihak yang meragukan tentang keamanan serta keefektifan sistem pembayaran ini. Sistem pembayaran melalui QRIS menimbulkan polemik di kalangan masyarakat maupun *merchant*.

Ditinjau dari kalangan masyarakat, sistem ini masih memerlukan adanya sosialisasi terkait prosedur penggunaannya, kondisi ini dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang masih memilih sistem pembayaran kontan dibandingkan dengan virtual atau *cashless*. Kemudian dari sudut pandang *merchant*, penerapan QRIS masih dirasa membebankan pihak *merchant* karena pengenaan *Merchant Discount Rate* (MDR) yaitu sejumlah 0,7% dari tiap transaksi. MDR merupakan potongan yang dikenakan oleh bank penyedia jasa QRIS dari setiap transaksi yang melibatkan sistem pembayaran QRIS.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya sistem pembayaran QRIS yang telah dikeluarkan Bank Indonesia yang melibatkan transaksi jual beli. QRIS yang dapat digunakan apabila uang elektronik tersedia di dalam sebuah aplikasi, terdapat persoalan yang dihadapi masyarakat muslim tentang aspek halal atau kesyariahnya. Maka perlu diteliti lebih lanjut tentang jual beli yang dikhususkan, dengan penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Quick Respon Indonesian Standard* dalam Transaksi Elektronik.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang Penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* dalam Transaksi Elektronik, dengan menganalisis peraturan tersebut berdasarkan hukum Islam dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah yang akan diteliti oleh penulis berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis.
  - a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman yang lebih mengenai penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik berdasarkan sudut pandang hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan berbagai macam transaksi pembayaran dalam sistem elektronik dan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan jual beli maupun transaksi pembayaran dengan sistem elektronik menurut perspektif hukum Islam.
  - b. Selain itu juga dapat memberikan khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademika Fakultas Syariah Jurusan Muamalah khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya hingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pertama, Skripsi oleh Nindi Anindya Putri dengan judul “Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019



Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang” oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2020.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang dan Pasar Peterongan Semarang. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai : 1. Pelaksanaan penggunaan *QR Code* untuk sistem pembayaran 2. Pelaksanaan penggunaan *QRIS* di Kota Semarang 3. Pengawasan transaksi *QRIS* yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Kedua, Skripsi oleh Linda Nur Hasanah dengan judul “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)” oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.<sup>16</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, dalam skripsi ini membahas keabsahan penggunaan uang elektronik yang kedudukannya setara dengan uang kertas dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dimana uang elektronik tersebut merupakan alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Nindi Anindya Putri, “Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), X.

<sup>16</sup> Linda Nur Hasanah, “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), xvii.

Ketiga, Skripsi oleh Rizki Lucia Tiyani dengan judul “Penggunaan *T-Cash* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam” (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah) oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018.<sup>17</sup> Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan sistem perhitungan dan tidak menggunakan data angka. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penggunaan *T-cash* dalam transaksi pembayaran elektronik yang terjadi di kalangan mahasiswa dan memberikan pemahaman yang lebih pada masyarakat mengenai penggunaan *Tcash* dalam transaksi pembayaran elektronik menurut perspektif hukum islam.

Keempat, Jurnal oleh Hutami A. Ningsih, Endang M. Sasmita, Bida Sari dengan judul “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik (QRIS) Pada Mahasiswa” oleh mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko terhadap keputusan menggunakan uang elektronik berbasis QRIS pada mahasiswa UPI YAI Jakarta. Penelitian ini menggunakan studi kausal dengan pendekatan

---

<sup>17</sup> Rizki Lucia Tiyani, “Penggunaan *T-Cash* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), ii.

<sup>18</sup> Hutami A. Ningsih, Endang M. Sasmita, dan Bida Sari, “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik (QRIS) Pada Mahasiswa,” *IKRA-ITH Ekonomik*, Vol: 4, No. 1 (2021): 1, <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1067>.

kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik *accidental sampling* sebanyak 65 responden. Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko memiliki kontribusi sebesar 72,9 % terhadap keputusan menggunakan uang elektronik berbasis QRIS pada mahasiswa UPI YAI Jakarta, sisanya 27,1% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model penelitian. Hasil dari uji tersebut disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan uang elektronik berbasis QRIS.

Kelima, Jurnal oleh Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, Suci Rahmayanti dengan judul “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response* Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan” oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara.<sup>19</sup> Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan QRIS pada UMKM di Medan, dan memaparkan peranan, kendala, dan pendapatan UMKM dengan adanya QRIS . Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka dengan para pedagang UMKM yang telah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran di tokohnya. Penelitian ini mengindikasikan bahwa QRIS mempunyai manfaat bagi para pedagang UMKM.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas, yaitu mulai dari rumusan masalah dan objek kajian yang berbeda. Penelitian yang memiliki kemiripan terbesar dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response* Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan,” *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol: 17, No. 2 (2020): 287, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/article/view/2384>.

Rizki Lucia Tiyani dimana titik fokus penelitian pada Transaksi Elektronik, letak perbedaan dengan penelitian tersebut yang pertama adalah pada objek penelitian, penulis akan melakukan penelitian dengan objek sistem transaksi elektronik melalui QRIS. Kedua, penulis akan mengkaji mengenai transaksi elektronik menggunakan QRIS berdasarkan hukum Islam dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada dasarnya tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan artinya data yang diperoleh dari penelitian adalah data yang benar-benar baru yang belum diketahui sebelumnya. Pembuktian artinya data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan suatu keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, sedangkan pengembangan artinya memperdalam atau memperluas pengetahuan yang telah ada.<sup>20</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi *Standar* Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, bahan sosialisasi QRIS dan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 25.

juga berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun laporan hasil penelitian dari yang terdahulu sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>21</sup> Dalam kaitan pada penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana penggunaan QRIS dalam pembayaran elektronik dan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

**2. Sumber Data**

Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data dapat diperoleh sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang diperoleh dari sebuah objek yang akan di teliti, yakni Peraturan anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* Untuk Pembayaran, Uang Elektronik Syariah dalam Fatwa DSN-MUI, buku-

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141.



buku yang berkaitan dengan jual beli, maupun mengenai hukum transaksi elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari berita, skripsi, jurnal, artikel, laporan dan majalah dari Bank Indonesia yang ada kaitannya dengan penelitian ini secara tidak langsung.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier yaitu yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>24</sup> Seperti kamus, ensiklopedia, serta hukum yang berkaitan dengan substansi pembahasan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu pendukung untuk mempengaruhi kualitas data hasil penelitian utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-

---

<sup>23</sup> Soerjono Suekanto, Sri Mamudi , *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

<sup>24</sup> Ibid., 54.

buku atau tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan yaitu menelaah terkait Peraturan anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* dengan mencari beberapa pemikiran dari Majelis Ulama Indonesia mengenai uang elektronik syariah.

Kemudian membaca, memahami, dan mengklasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga dapat mengetahui hasil dari pembahasan yang telah diteliti. Di samping itu juga ditelusuri serta dikaji melalui buku-buku dan tulisan-tulisan lain berupa jurnal, karya ilmiah, berita, laporan yang mendukung atau menunjang katajaman dan kedalaman pembahasan dalam penelitian ini.

#### **4. Metode Pengolahan Data**

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, Langkah-langkah pengelolaan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

##### **a. Pemeriksaan data (*Editing*)**

Melakukan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* ini juga untuk memeriksa apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau aturan rumusan masalah.

c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematika data dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah setelah diadakan pengecekan.

## 5. Metode Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan yaitu setelah mengumpulkan dan menggunakan pemeriksaan data (*Editing*), yang disusun secara sistematika data, dan kemudian di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Cara berfikir deduktif yaitu penelitian yang berangkat dari praktik prinsip-prinsip syariah yang khusus digeneralisasi untuk ditarik secara umum berdasarkan hukum Islam. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui penggunaan penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik dan

kemudian selanjutnya dianalisa berdasarkan hukum Islam melalui sudut pandang hukum ekonomi syariah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, penulis membagi beberapa sub bab yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, yakni berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan Hukum Islam tentang jual beli, Uang Elektronik Syariah dan Transaksi Elektronik. Bab ini berisi teori-teori meliputi: pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, etika dan prinsip jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, sistem transaksi elektronik, pembayaran elektronik, jenis-jenis transaksi elektronik, mekanisme transaksi elektronik dan uang elektronik syariah dalam fatwa DSN-MUI.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang QRIS (*Quick response Indonesian standard*), yakni berisi tentang pengertian *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS), pihak-pihak yang terkait dalam transaksi elektronik, ruang lingkup penggunaan QR code pembayaran, aplikasi di Indonesia yang terhubung *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS), batas

transaksi QRIS, pemrosesan transaksi QRIS, manfaat QRIS, kelebihan dan kelemahan QRIS.

Bab keempat merupakan penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik dan analisis hukum Islam terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik.

Bab kelima merupakan Penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta rekomendasi yang dapat memberikan manfaat untuk segala pihak.





## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Hukum Islam Tentang Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan (*al-bai'*) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal (*al-bai'*) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata (*asy-syirā'*) beli.<sup>1</sup>

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>2</sup>

Menurut terminologi atau menurut pengertian syari'at, jual beli ialah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang).<sup>3</sup>

Menurut Hanafiah pengertian jual beli atau (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah/Hambali, bahwa jual beli

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 111.

<sup>2</sup> Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2016), 21.

<sup>3</sup> Syukri Iskak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 167-168.

atau (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>4</sup>

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar-menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>5</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>6</sup>

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 101.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 167.

<sup>6</sup> Jafar Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 140.

<sup>7</sup> Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam," *Ummul Qura*. Vol. 3, No. 2 (2013): 60, <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view2025/1503>.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

### 1. Dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

#### a. Surah Al-Baqarah [2] : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

*“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah [2] : 275)*

#### b. Surah Al-Baqarah [2] : 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
(البقرة : 282)

*“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah [2] : 282)*

#### c. Surah Al-Baqarah [8] : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (البقرة : 198)

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.” (Al-Baqarah [8] : 198)*

d. Surah An-Nisa' [4] : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (انساء : 96)

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa [4]: 29)*

2. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’I ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
 قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)<sup>8</sup>

*Dari Rifa’ah bin Rafi’ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah Saw pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini).*

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa’id:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَلَا مِثْنُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ (رواه تيمذهي)<sup>9</sup>

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnnya di surga) dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada.” (H.R At-Tirmidzi. Berkata Aby ‘Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih).*

<sup>8</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam “Maktabah Nushthafa Al-Babiy Al-Halabiy”*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 4.

<sup>9</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Maktabah Kutub Al-Mutun*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 515.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ  
لَأَمِينُ الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)<sup>10</sup>

*Dari Ibnu ‘Umar ia berkata : Telah bersabda Rasulullah:*

*“Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah).*

3. Dasar hukum berdasarkan Ijma’, antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَاطِلٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>11</sup>

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul di atas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan kadang berada di tangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

<sup>10</sup> Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, juz II, (Beirut: Dar al-Alya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t. 2008), 50.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.



### 3. Etika dan Prinsip Jual Beli

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk itu, sebagai masyarakat muslim tentu harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas ekonominya terutama dalam hal jual beli.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. *Ar-rida*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
- b. Persaingan sehat (*fair competition* ). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

- d. Keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.<sup>12</sup>

Adapun dalam Jual beli memiliki beberapa etika, antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak biasa dihindari oleh seorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bias terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas.

- b. Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 268-269.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.

e. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang.<sup>13</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis).

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Gema Insani : Jakarta, 2011), 27-28.

(Arab, *rukn*) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).<sup>14</sup>

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menuar, atau saling memberi. Atau lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>15</sup> Rukun jual beli terdiri dari :

a. Ijab dan Qabul

Secara umum *ijab* dan *qabul* ini sudah diuraikan dalam bab yang lalu ketika membahas mengenai akad. Namun dalam pembahasan ini uraian lebih khusus lagi, yakni hanya berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* dalam akad jual beli.<sup>16</sup>

1) Pengertian *Ijab* dan *Qabul*

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul

<sup>14</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015): 245-246, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 179.

<sup>16</sup> Ibid., 180.

pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Adapun pengertian *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.<sup>17</sup>

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.<sup>18</sup>

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>19</sup>

## 2) *Shighat Ijab dan Qabul*

*Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid., 181.

<sup>19</sup> Ibid.



pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.<sup>20</sup>

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.<sup>21</sup>

- a) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab *qabul* dengan cara tulisan (*kithbah*).
- b) Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c) Dengan cara *ta'hi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang

---

<sup>20</sup> Ibid., 182.

<sup>21</sup> Abdul Rahman, Ghufroon, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 70.

diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

- d) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.<sup>22</sup>

b. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus :

- 1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebelum kemungkinan besar pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam.
- 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik

---

<sup>22</sup> Ibid., 71.

baginya. Maka orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.

- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- 4) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sudah berumur 5 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- 5) Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*)<sup>23</sup>

c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

*Ma'qud 'Alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

---

<sup>23</sup> Ibid., 72.

- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>24</sup>

Sedangkan syarat secara bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.<sup>25</sup>

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqih*, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang

---

<sup>24</sup> Ibid., 75.

<sup>25</sup> Ibid., 76.

<sup>26</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 120.

yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* (ditangguhkan) yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzum* (mengikat), akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>27</sup> Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu :

a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli :

1) Syarat '*Aqid*

Syarat untuk *aqid* (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua :

- a) *Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Hanafiah tidak mensyaratkan *aqid* harus baligh. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* (mulai dari umur tujuh tahun), hukumnya sah.

---

<sup>27</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

b) *Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang anaknya yang masih di bawah umur dengan hanya pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.<sup>28</sup>

## 2) Syarat Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di *ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual. *Ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal.<sup>29</sup> Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah. Syarat *ijab qabul* adalah :

a) Pelaku transaksi harus *mumayyiz* . Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang

<sup>28</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 188.

<sup>29</sup> Syekh Zakariya al-Anshari, *Syahrul Manhaj*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 260.



sudah *mumayyiz* hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

- b) Pernyataan *qabul* harus sesuai dengan pernyataan *ijab* Penjual menjawab sesuai dengan yang dikatakan pembeli.<sup>30</sup>

### 3) Syarat Tempat Akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.<sup>31</sup>

### 4) Syarat *Ma'qud 'alaih* (Objek Akad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak. Akan tetapi untuk beberapa jenis akad dikecualikan dari syarat ini, seperti jual beli *salam*, *istishna'*, dan menjual buah-buahan di pohonnya setelah kelihatan sebagiannya. Ini menurut pendapat sebagian Hanafiah.
- b) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwin*. Pengertian *mal mutaqawwin* adalah setiap barang yang bisa dikausai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 73.

<sup>31</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 189.

*ikhtiyar*. Dengan demikian, tidak sah jual beli *mal* yang *ghair mutaqawwin*.

- c) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perseorangan, dan kayu bakar.
- d) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik si penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut.<sup>32</sup>

#### b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib :

##### 1) Ketidakjelasan (*Al-jahalah*)

Yang dimaksud di sini ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu :

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual baik, jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.

---

<sup>32</sup> Ibid., 190.

- b) Ketidakjelasan harga.
- c) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.<sup>33</sup>

## 2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

Paksaan ini ada dua macam:

- a) Paksaan Absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
- b) Paksaan Relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.<sup>34</sup>

## 3) Pembatasan dengan Waktu (*At-Tauqit*)

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”.

<sup>33</sup> Ibid., 191.

<sup>34</sup> Ibid.

Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.<sup>35</sup>

#### 4) Penipuan (*Al-Gharar*)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan dengan pernyataan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada *wujud* (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.<sup>36</sup>

#### 5) Kemudharatan (*Adh-Dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.<sup>37</sup>

#### 6) Syarat yang Merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakan selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.<sup>38</sup>

Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli atau ijarah, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.<sup>39</sup> Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut :

- a) Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid., 193.

dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap (*aqar*) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.

- b) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah, tauliyah, wadi'ah*, atau *isyarak*.
- c) Saling menerima (*taqabud*) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).
- d) Dipenuhi syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan) yaitu : Sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, barang yang diserahkan sebaiknya barang yang diperjual belikan dipasar, harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.
- e) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
- f) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.



c. Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat *Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat adalah sebagai berikut :

1) Kepemilikan atau hak milik

Pengertian kepemilikan atau hak milik adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tassaruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan ada kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan. Kekuasaan itu adakalanya asli, yakni orang yang bersangkutan menguasai dan melaksanakan sendiri urusan pribadinya, dan adakalanya *niyabi* (pengganti), yakni seseorang yang menguasai dan melaksanakan urusan dan kepentingan orang lain yang *ahliyah*-nya tidak sempurna. Pengantian ini adakalanya diberikan kuasa oleh pemilik sendiri, seperti wakil, atau diberikan kuasa oleh syara, seperti wali, *washiy*, dan hakim.

2) Pada benda yang dijual tidak terdapat hak orang lain.

Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang

menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai), dan *musta'jir* (penyewa). Jual beli menurut Hanafiah tidak *fasid*, karena dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* terhadap *mal mutaqawwim* yang dimilikinya dan bisa diserahkan, tanpa ada kemudharatan.<sup>41</sup>

Dilihat dari segi syarat *nafadz* ini, jual beli dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

- a) Jual beli *nafadz* (bisa dilangsungkan), yaitu jual beli yang rukunnya, syarat *in'iqad* dan syarat *nafadz*-nya terpenuhi.
- b) Jual beli *mauquf* (ditangguhkan), yaitu jual beli yang rukunnya dan syarat *in'iqad*-nya terpenuhi, tetapi syarat *nafdz*-nya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat *nafadz* ini adakalanya berkaitan dengan *mabi'* (objek jual beli), seperti jual beli *fudhuli*, dan adakalanya berkaitan dengan *tasarruf*, seperti jual beli anak yang *mumayyiz*. Jual beli *fudhuli* adalah suatu akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan, karena barang yang dijualnya milik orang lain.<sup>42</sup>

d. Syarat Mengikatnya Jual Beli (Syarat *Luzum*)

Untuk mengikatnya (*luzum*-nya) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar*

---

<sup>41</sup> Ibid., 194.

<sup>42</sup> Ibid., 195.

*syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib. Abial di dalam akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.*<sup>43</sup>

## 5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

### a. Jual Beli *Salam* (Pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

### b. Jual Beli *muqayadhah* (Barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

### c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

### d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid.

## 6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang hukumnya najis dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih dapat perut induknya.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Balaqah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di landing atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *mummassah*, yaitu jual beli yang secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuhnya berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang

---

<sup>44</sup> Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 101.

karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lembar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepada apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab qabul*.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti kepada seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual ada pembeli.<sup>45</sup>

## B. Uang Elektronik Syariah dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman penggunaan Uang Elektronik Syariah. Fatwa DSN-MUI ini berlandaskan hukum :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (انساء : 58)

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ... (Q.S An-Nisa [4] :58)*

Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 memuat hal-hal berikut:

### Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
  - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - b. Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
  - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 78-81.



- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah ialah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.<sup>46</sup>
3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah uang nominal yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
6. *Principal* adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
7. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
  - a. Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
  - b. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
8. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

---

<sup>46</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 7.

9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
10. Penyelenggara penyelesaian akhir ialah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
13. Akad *qardh* adalah akad peminjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.<sup>47</sup>
14. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

---

<sup>47</sup> Ibid., 8.

15. Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju' l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
17. Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
  - a. Biaya pengganti media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
  - b. Biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
  - c. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
  - d. Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-anwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
19. *Gharar* adalah ketidak pastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.

21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cocok.
22. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
23. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.<sup>48</sup>

### **Kedua: Ketentuan Hukum**

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

### **Ketiga: Ketentuan Terkait Akad Dan Personalia Hukum**

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
  - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
    - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
    - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
    - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad

---

<sup>48</sup> Ibid., 9.

titipan (*wadiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qard*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.

- 4) Otoritas terkaid wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipandari pemegang kartu (dana *float*).
- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
- 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal*, *asquirer*, pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*.<sup>49</sup>
  - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*.
  - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*.
3. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*.
  - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:62/DSN-MUI/XII/2017 tentang akad *ju'alah*.
  - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana

---

<sup>49</sup> Ibid., 10.



terdapat dalam DSN-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*.

#### **Keempat: Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas**

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Kelima: Ketentuan Dan Batasan Penyelenggaraan Dan Penggunaan Uang Elektronik**

Penyelenggara dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

1. Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah*, dan *israf*; dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.<sup>50</sup>

#### **Keenam: Ketentuan Khusus**

1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

---

<sup>50</sup> Ibid., 11.

### **Ketujuh: Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### **Kedelapan: Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

## **C. Sistem Transaksi Elektronik**

### **1. Pembayaran Elektronik**

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke-6 dijelaskan bahwa Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dalam masyarakat harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi.<sup>51</sup>

Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembayaran elektronik yang kita

---

<sup>51</sup> Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran baru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 10.

kenal dan sudah ada di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit atau ATM. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, seluruh pembayaran elektronik tersebut selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap intruksi pembayaran yang dilakukan nasabah, baik melalui *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit maupun kartu debit atau ATM, selalu melalui proses otorisasi dan akan dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut.<sup>52</sup>

## 2. Jenis- jenis Transaksi Elektronik

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain:<sup>53</sup>

### a. Penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik

Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang (*top up*).

### b. Pembelian

Transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

<sup>52</sup> Ibid.,

<sup>53</sup> Muamar, "Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective" *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 2 (2017), 75-84.

c. *Transfer*

*Transfer* dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.

d. *Tarik Tunai*

Tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilaksanakan setiap saat oleh pemegang.

e. *Refund/Redeem*

*Refund/Redeem* yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.<sup>54</sup>

### 3. Mekanisme Transaksi Elektronik

Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga

---

<sup>54</sup> Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, dkk, *Operasional E-money*. (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2006), 10-11.

macam, yakni *Single Issuer*, *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator*. *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator* secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu *Issuer* yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaanya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan. Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (*Issuer*), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (*Merchant*) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (*Merchant*) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (*Issuer*).<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *Tentang Uang Elektronik*, 1-2.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*. Juz II. Beirut: Dar al-Alya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t. 2008.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2019.
- At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Maktabah Kutub Al-Mutun*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Dyah Ayu Paramitha, Dian Kusumaningtyas. *QRIS*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, dkk. *Operasional E-money*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia. 2006.
- Jafar Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- M.Manullang, *Ekonomi Moneter*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1980.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers. 2015.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam "Maktabah Nushthafa Al-Babiy Al-Halabiy"*. Jakarta: Darus Sunnah. 2017.
- Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.



- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2016.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pertama. 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2016.
- Soerjono Suekanto, Sri Mamudi , *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2010.
- Syafé'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syekh Zakariya al-Anshari, *Syahrul Manhaj*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Syukri Iskak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. Gema Insani : Jakarta. 2011.
- Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. VII ed. Bandung: Tarsito. 1995.
- Wiyono Slamet, *Transaksi dan Akad dalam Operasi Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo. 2005.

## JURNAL

- Ayatulloh Michael Musyaffi, Kayati, “Dampak Kemudahan dan Risiko Sistem Pembayaran QR Code: Technology Acceptance Model (TAM) Extension,” *Jurnal Inspirasi Bisnis & Manajemen*. Vol. 3, No. 2 (2019): 170. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jibm>.
- Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Eka Ayu Purnama Lestari, “Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code dalam E-Commerce.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1 (2020): 35. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH>.

- Hutami A. Ningsih, Endang M. Sasmita, dan Bida Sari. "Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik (QRIS) Pada Mahasiswa." *IKRA-ITH Ekonomik*. Vol. 4, No. 1 (2021): 1. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1067>.
- I Wayan Arta Setiawan, Luh Putu Mahyuni. "QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Udayana*, Vol. 9, No. 10 (2020): 922. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/66371>.
- Josef Evan Sihalo, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti. "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan." *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol: 17, No. 2 (2020): 287. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magistermanajemen/article/view/2384>.
- Muamar. "Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective" *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 2 (2017), 75-84. <http://journal.uui.ac.id/JIEariba/articel/view/9657>.
- Nur Rizki Febriandika, Fifi Hakimi. "Analisis Kesuaian Syariah *Electronic Money* pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia." *An-Nisbah*, Vol. 7, No. 1 (2020), <http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/2183>.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2 (2015): 245-246. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>.
- Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam. " *Ummul Qura*. Vol. 3, No. 2 (2013): <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2025/1503>.
- Siti Indah Purwaning Yuwana, Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19". *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*. Vol. 2, No. 1, (2020): 56. <https://jtebr.unisan.ac.id/>.

## SUMBER LAINNYA

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Linda Nur Hasanah, “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Nindi Anindya Putri, “Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang”. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.

Onny Widjanarko, “QRIS Satu QR Code Untuk Semua Pembayaran”, *Bank Indonesia*, 2019, [http://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP\\_21219.aspxm](http://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_21219.aspxm).

PADG.No.21/18/PADG/2019.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *Tentang Uang Elektronik*.

Rizki Lucia Tiyani, “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.